

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH: DINKOMINFO

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN N 2021 (%)	STATUS			CAPAIAN N.s.d 2021 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		TT	AT	UK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
INDIKATOR SASARAN																												
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	2,04	2,5	2,75	2,85	2,90	3,00	2,82	3,61	2,78			97,54	AT		92,67	AT	Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kemajuan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kemajuan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Kebutuhan yang tinggi akan penggunaan layanan SPBE	- masih sedikitnya kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE	- masih rendahnya anggaran untuk pengembangan ITK	- sedikitnya SDM di bidang ITK	- masih adanya beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi	-Desain kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE	-Memperbaiki pendokumentasi dan tata kelola SPBE
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	77,90	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00	80,03	95,50	89,56			93,68	AT		93,3	AT	Nilai Keterbukaan Informasi setiap tahunnya didapatkan melalui	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai yang merepresentasikan kinerja dan kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Penilaian menjadi kewenangan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP, untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Semangat PPID Utama didorong dukungan dari seluruh stakeholder, baik PPID OPD, Kecamatan dan Desa	-Ketidakseimbangan jumlah anggaran dengan banyaknya badan publik yang menjadi tanggungjawab PPID Utama	-Seringnya pengantian pelaku/admin PPID pembantu yg mengakibatkan dibutuhkan pembinaan dan awal	(Caption menurun karena standar penilaian diturunkan oleh KIP, tetapi secara prestasi naik, karena kurang 0,54 ke kategori informatif)	Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik dan mempersiapkan pengumpulan dokumentasi yang disampaikan ke publik di awal tahun		
INDIKATOR PROGRAM																												
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	6,7	9	12	15	18	20	10,704	13,20	14,66			97,75	AT		73,31	AT	Jumlah PPID badan publik yang aktif dibagi jumlah badan publik dikali 100%	Total PPID: 341, PPID aktif 45 (OPD, Kecamatan, Kel/Desa)	Pemahaman PPID Badan Publik, baik tingkat OPD, Kecamatan dan Desa yang semakin baik dalam mewujudkan transparansi publik.	Load pekerjaan yang cukup tinggi di PPID Badan Publik, sehingga pekerjaan yang terkait transparansi sering terbaik.	Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas dengan PPID Pembantu Badan Publik serta meningkatkan frekuensi kegiatan monit dan pendampingan dengan PPID Badan Publik.				
			Jumlah PPID badan publik yang aktif					38	45	50																		
			Jumlah PPID badan publik					355	341	341																		
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	5	10	15	20	25	30	15,63	15,63	21,88			100,00	TT		72,92	AT	Jumlah KIM yang aktif dibagi jumlah KIM yang ada dikali 100%	Jumlah KIM 32, yang aktif 5 KIM (di Kec. Bulu dan Kecamatan Jumo)	Semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi	Secara kegiatan semua sudah jalan hanya administrasi tentang pencatatan dan pelaporannya saja yang belum maksimal	Meningkatkan frekuensi pendampingan kepada KIM yang sudah terbentuk secara lebih intensif dan menyelenggarakan kegiatan diseminasi lebih terfokus				
			Jumlah KIM yang aktif					5	5	7																		
		Jumlah KIM					32	32	32																			

NO	RUMUS/SASARAN /PROGRAM	KINERIA	N	2018					2019					2020					2021					N 2021 (%)			N s.d 2021 (%)			STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	TT	AT	UK	TT	AT	UK	TT	AT	UK	TT	AT	UK	TT	AT	UK									
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24								
	Percentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	TT			100	TT			Jumlah LPP yang patuh terhadap norma siaran dibagi jumlah LPP dikali 100%	LPL (Pemkab) 1, LPS (swasta) 5, LPK (Komunitas) 1, LPPL TV 1	Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SP3 (Standar Program Siaran)	Batum terselenggaranya workshop TOT Penyiaran karena terkendala Pandemi Covid-19	Meningkatkan kerjasama dengan LP di Kabupaten Temanggung dengan mengadakan kegiatan bersama									
	Jumlah LPP dengan kategori patuh										8	8	8																								
	Jumlah LPP										8	8	8																								
2	Program Aplikasi Informatika	Percentase ketersediaan jaringan intranet	%	59,49	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10			88,10		AT		88,10		AT		Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	Jumlah OPD, Desa/Kel 395, jumlah yang sudah terhubung 348	Cost sharing pengadaan peralatan jaringan dibeberapa desa yang didukung dengan alokasi dana untuk pembelian aset perlatan jaringan yang dianggarkan dari APBDes	- Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. - Beberapa UPT sudah dihapus dan tidak lagi masuk dalam organisasi perangkat daerah sehingga	Perambahan anggaran untuk pengadaan repeater yang dapat diakses untuk desa-desa										
	Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung jaringan dari Kominfo									317	324	348																									
	Jumlah OPD,UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.									395	395	395																									
	Percentase sistem informasi yang terintegrasi	%	7	15	20	30	40	50	13,23	16,17	16,99			56,64		UK	33,98		UK	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Jumlah Total SI: 500, SI terintegrasi : 76	Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan, PD secara mandiri telah memiliki akses internet dengan berlangganan ke ISP	Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh PD menyebab prosentase integrasi aplikasi rendah atau tidak sesuai target, dikarenakan website yang sama atau sejenis penghitungannya 1 - 1 dalam istilah yang lain belum dikelompokkan menurut jenisnya. website yang dimaksud sbb : -Website SID = 289 (harusnya 1) -Website Kecamatan = 20 (harusnya 1) -Website OPD/Dinas/Badan = 23 (harusnya 1) -Website PPID pembantu = 46 (harusnya 1) -Simpus = 26 (harusnya 1) -Website Puskesmas = 26 (harusnya 1) -Paten Kecamatan = 20 (harusnya 1) TOTAL pengurangan jumlah wibsite = 443	Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD													
	Jumlah sistem informasi terintegrasi								61	82	87																										
	Jumlah sistem informasi								461	507	512																										
	Percentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	38	40	45	50	55	60	40,13	52,27	52,15			100,00	TT			86,91		AT	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	Total SI: 500, SI berfungsi optimal : 258	Meningkatnya kemauan dan kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi	Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang	Penambahan SDM TI dan diterbitkannya regulasi yang mengatur pengelolaan sistem												
	Jumlah sistem informasi berfungsi optimal								185	265	267																										
	Jumlah sistem informasi								461	507	512																										

No	Program	Kinerja	N	2018	2019					2020					2021					RUMUS IKPD			Penjelasan IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHINDARAT	REKOMENDASI																	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	N 2021 (%)	2021 (%)	TT	AT	UK	TT	AT	UK																					
3	2	Persentase ketersedian akses internet publik	%	41	61	60	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
Jumlah Area publik Yang terhubung jaringan dari Kominfo				42	44	44																																					
Jumlah Area publik				60	60	60																																					
Jumlah Indikator sasaran				2																																							
Rata rata capaian kinerja sasaran				96	0	2	0	0	0	93	0	2	0																														
Jumlah Indikator Program				7																																							
Rata rata capaian kinerja program				87,98	3	3	1	1	1	75,51	1	5	1																														
Jumlah IKPD				9																																							
Rata rata capaian kinerja Bidang Komunikasi dan informatika				91,79	3	5	1	1	1	84,24	1	7	1																														

BIDANG STATISTIK

INDIKATOR TUJUAN																						
Indeks Pembangunan Manusia		68,99		69,57	69,84	70,16	70,49	69,56	69,57	69,88			100,00	TT		99,13	AT	IPM adalah suatu nilai indeksasi tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli untuk menggambarkan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah Rumus = Akar pangkat tiga hasil perkalian indeksasi kesehatan, pendidikan, dan penghasilan dikalikan 100	-Tingkat kesehatan usia harapan hidup -Pendidikan = harapan lama sekolah -Penghasilan = pendapatan perkapita	Usia harapan hidup penduduk Temanggung yang tinggi yaitu 75,47 th	-Angka harapan lama sekolah masih relatif rendah -Daya beli masyarakat Temanggung yang masih rendah	-Meningkatkan program bantuan penduduk miskin -Meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja
Perumbuhan Ekonomi	-	5,13	5,20	-2,06	2,50	3,50	4,80	5,05	0	-2,13			0,00		UK	0,00		PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dikalikan 100%	Menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Perkembangan PDRB ADHK yang cenderung meningkat setiap tahun	Masih kecilnya distribusi sub sektor penyumbang PDRB selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Perlunya peningkatan sub sektor selain pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan bimbingan dan investasi
Inflasi	-	2,9	4,0	1,5	2,50	3,50	4,00	2,66	1,5	2,66			100,00	TT		66,50	AT	In = IHK thn N dikurangi IHK N-1 dibagi IHK N-1 dikalikan 100%	-In = Inflasi/deflasi tahun-N -IHKn = Indeks Harga th N -IHKn-1 = Indeks harga th N-1	-Inflasi di Kab. Temanggung masih fluktuatifnya dipengaruhi produksi-produk hasil pertanian dimana produk hasil pertanian dipengaruhi kurun 2 thn kebelakang inflasi di Kab. Temanggung dibawah inflasi propvinsi dan nasional	Inflasi di Kab. Temanggung, Temanggung dalam membantu pemasaran produk pertanian -Campur tangan Pemkab Temanggung untuk membantu menjaga ketetapan harga jual produk pertanian	-Pentingnya Pemkab Temanggung dalam membantu pemasaran produk pertanian -Campur tangan Pemkab Temanggung untuk membantu menjaga ketetapan harga jual produk pertanian
Pendapatan per Kapita	Juta Rp	26,46	27,5	27,23	27,68	28,45	29,57	28,05	27,23	27,70			100,00	TT		93,68	AT	PDRB ADHK th-n dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun	Menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disuatu wilayah dan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam tahun yang sama	Selama kurun waktu 5 tahun terakhir pendapatan perkapita selalu mengalami kenaikan	Masih kurang berkembangnya sub sektor diselain sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Memberikan bimbingan keterampilan stimulus agar sub sektor selain perikanan berkembang, meningkatkan investasi masuk ke Kab. Temanggung

/PROGRAM	KINERJA	N	2018	2019									LAPORAN N 2021 (%)	STATUS N.s.d 2021 (%)	STATUS	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022				TT	AT	UK						
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Juta Rp	3,24	3,2	3,85	3,50	3,50	3,50	2,99	3,85	2,62				100	TT			100	TT				
INDIKATOR PROGRAM																								
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	66,67			UK	66,67	AT	Jumlah data makro daerah yang tersedia dibagi 3 dikali 100%	Data makro yang dibutuhkan meliputi data pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = 3 data	Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan Ketersedian data ditiap OPD	Beberapa data statistik yang terkumpul tidak tepat waktu karena ada beberapa perubahan rekonstruksi dari provinsi, sementara OPD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan secara mandiri (menunggu dan BPS)	Pemberian perjadwalan Kegiatan pengumpulan data statistik
		Jumlah data makro yang tersedia								5	5	4												
		Jumlah Kebutuhan data makro								5	5	6												
Jumlah Indikator Program		1	Rata rata capaian kinerja program												67	0	0	1	67	0	1	0		
Jumlah IKPD		1	Rata rata capaian kinerja Bidang statistik												67	0	0	1	67	0	1	0		
BIDANG : PERSANDIAN																								
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	8,3	7,5	9	12,5	16	19,5	1,30	10,29	20,59			100	TT			100	TT				
		Jumlah sistem elektronik yang sudah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko								6	7	14												
		Jumlah sistem elektronik								461	68	68												
Jumlah Indikator Program		1	Rata rata capaian kinerja program												100	1	0	0	100	1	0	0		
Jumlah IKPD		1	Rata rata capaian kinerja Bidang persandian												100	1	0	0	100	1	0	0		
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD		2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH												95,61	0	2	0	92,98	0	2	0		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD		9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												84,88	4	3	2	80,73	2	6	1		
JML SEMUA INDIKATOR		11	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH												90,25	4	5	2	86,85	2	8	1		

Keterangan :

Capaian 2021

Capaian	Status	Capaian	Status
100%	Telah Tercapai	100%	Telah Tercapai
75 - 99,99 %	Akan Tercapai	60 - 99,99%	Akan Tercapai
0 - 74,99 %	Upaya Keras	0 - 59,99%	Upaya Keras

